

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banjar. 2016. “Peranan Kelembagaan Desa Dalam Menyusun dan Menyetujui APBDes”, <http://bpkad.banjarkab.go.id/index.php/2016/05/20/peranan-kelembagaan-des-dalam-menyusun-dan-menyetujui-apbdes/>, diakses pada tanggal 14 Agustus 2019 pukul 15.15.
- Berdesa. 2015. “Alur dan Peran dalam Penyusunan APBDesa”, <http://www.berdesa.com/alur-dan-peran-dalam-penyusunan-apbdesa/>, diakses pada tanggal 21 September 2019 pukul 23.25.
- Bejo,Untung. 2016. “Keterbukaan Informasi Pemerintah Desa”, http://kedesa.id/id_ID/keterbukaan-informasi-pemerintahan-des/, diakses pada tanggal 14 Agustus 2019 pukul 14.10.
- Dwijowijoto, Riant Nugroho. 2003. *KEBIJAKAN PUBLIK Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta: Gramedia.
- Febriananingsih, N. 2012. KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DALAM PEMERINTAHAN TERBUKA MENUJU TATA PEMERINTAHAN YANG BAIK. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v1i1.110>
- Irianto, agus. 2004. *Statistik Konsep Dasar , Aplikasi dan Pengembangannya*. Kencana Prenada Media Group
- Kristiyanto, E. N. 2016. Urgensi Keterbukaan Informasi dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*. <https://doi.org/10.30641/dejure.2016.v16.231-244>
- Kuncoro, M. 2004. Otonomi Daerah dan Pembangunan Daerah: Reformasi, Perencanaan, Strategi, dan Peluang. In *Unisia*. <https://doi.org/10.20885/unisia.vol27.iss53.art12>
- Lina Miftahul Jannah & Bambang Prasetyo. 2016. Metode Penelitian Kuantitatif : Teori dan Aplikasi / Penulis. In *Materi Pokok Metode Penelitian Kuantitatif*.
- Morissan. 2016. *METODE PENELITIAN SURVEI*. Jakarta: KENCANA.
- Partodihardjo, Soemarno. 2008. *TANYA JAWAB SEKITAR UNDANG-UNDANG NO 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Putra, Fadillah. 2003. *PARADIGMA KRITIS DALAM STUDI KEBIJAKAN PUBLIK*. Yogyakarta: PUSTAKA PELAJAR.

- Riyanto, A. 2012. PEMAHAMAN UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK. *Jurnal Hukum & Pembangunan*. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol42.no4.270>
- Saputra, Roni. 2017. “Kontrol Kebijakan Melalui Keterbukaan Informasi Oleh: Roni Saputra”, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt591154fb784e4/kontrol-kebijakan-melalui-keterbukaan-informasi-oleh--roni-saputra/>, diakses pada tanggal 30 September 2019 pukul 21.10.
- Silalahi, U. 2015. Metode Penelitian Sosial Kuantitatif. *Journal of Visual Languages & Computing*.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Alfabeta.
- Sugiyono. 2015. Metode Penelitian Pendidikan. Bandung. In *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*.
- Sujarweni, V. W. 2015. *Akuntansi Desa: Panduan Tata Kelola Keuangan Desa*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Sumartias, Suwendi. 2016. *Dinamika Keterbukaan Informasi Publik*. Jakarta Timur: PT. Balai Pustaka (Persero).
- Wibawa, K. C. S. 2019. Urgensi Keterbukaan Informasi dalam Pelayanan Publik sebagai Upaya Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik. *Administrative Law & Governance Journal*. <https://doi.org/10.14710/ALJ.V2I2.218-234>
- Widjaja. 2002. *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Widjaja, H. 2010. OTONOMI DESA MERUPAKAN OTONOMI YANG ASLI, BULAT DAN UTUH. In *Rajawali Pers*.
- Yusuf, M. 2011. *Delapan Langkah Kreatif Tata Kelola Pemerintah dan Pemerintah Daerah*. Jakarta: Selemba Empat.